



MENTERI DALAM NEGERI RI

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA UPACARA HUT SATPOL PP KE-69, HUT SAT LINMAS KE-57, DAN HUT WH KE-16 TAHUN 2019 Tanggal 26 Maret 2019

*Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua*

Yang kami hormati (disesuaikan);

- ✚ Gubernur Aceh;**
- ✚ Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- ✚ Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;**
- ✚ Para Aparatur SatPol PP, Aparatur Sat Linmas, serta Aparatur WH;**
- ✚ Hadirin dan Undangan Sekalian.**

Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT, karena atas rahmat dan inayah-Nya kita dapat dipertemukan di acara Hut Sat Pol PP Ke-69, HUT Sat Linmas Ke-57, dan WH Ke-16 Tahun 2019.

Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana yang kita lakukan hari ini, tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan HUT SatPol PP Ke-69, dan HUT Sat Linmas Ke-57 dan WH Ke-16 mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

SatPol PP, Sat Linmas, dan WH bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif, tetapi lebih dari itu, berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda nasional bangsa Indonesia.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Peran penting SatPol PP, Sat Linmas, dan WH tercermin dari tugas dan tanggungjawabnya. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Perlindungan Masyarakat secara khusus dibentuk dan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketenteraman ketertiban masyarakat, membantu penanganan ketenteraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta membantu upaya pertahanan negara. Wilayahul Hisbah dibentuk untuk menegakkan Qanun; pengawasan Syariat Islam; dan pembinaan terhadap pelanggar syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, negara Indonesia akan memasuki agenda nasional yang sangat penting, menjadi puncak indikator kualitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif secara serentak.

Seluruh aparatur pemerintahan dan komponen bangsa lainnya mempunyai kewajiban untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif.

Mari bersama-sama kita jaga kualitas penyelenggaraan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, Luber dan Jurdil serta bermartabat. Menjadi barisan terdepan dalam melawan “racun demokrasi”, yaitu politik uang, politisasi SARA, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Harus dipastikan agar semua pihak dan komponen bangsa ini mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan. Sehingga proses demokrasi ini nantinya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia.

Aparatur SatPol PP, Sat Linmas, dan WH sebagai aparatur pemerintahan daerah yang memiliki kompetensi handal di bidangnya, telah dibekali dengan kecerdasan lapangan sesuai dengan kondisi geografis daerah, berperan penting dalam turut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi ini. Mengawal proses demokrasi sampai ke tingkat masyarakat, dengan tetap siaga menjaga keamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, dan objek vital masyarakat lainnya.

Namun begitu, dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban, sungguh-sungguh saya ingatkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum ini. Netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara akan turut mempengaruhi berjalannya seluruh proses demokrasi sesuai dengan ketentuan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada prakteknya di berbagai daerah, beban tugas dan risiko pekerjaan yang ditanggung belum cukup mendapatkan apresiasi yang memadai. Ketimpangan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan trantibum linmas, sangat bisa kita rasakan, dan belum menjadi prioritas sebagai sebuah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Sebagai penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, undang-undang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa kelembagaan, penganggaran, sarana prasarana, jumlah dan kompetensi aparatur, serta pedoman penyelenggaraan layanan harus sesuai dengan peraturan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya instruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait untuk melakukan penguatan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum di daerah melalui langkah-langkah diantaranya:

Pertama, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, Penguatan SatPol PP, Sat Linmas, dan WH menjadi sebuah keniscayaan seiring tugas fungsi dan tanggung jawab yang diemban.

Kedua, melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Secara kuantitas terpenuhi kebutuhan jumlah aparatur, secara kualitas terjamin kompetensi aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, termasuk didalamnya jenjang karier dan kesejahteraan aparatur. **Ketiga**, melakukan penguatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas fungsi. Dalam hal ini terutama sarana prasarana untuk proteksi aparatur dan penyelamatan masyarakat. **Keempat**, alokasi anggaran yang memadai bagi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada akhirnya, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun Sat Pol PP Ke-69, Sat Linmas Ke-57, dan WH Ke-16 terus tingkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan guna mewujudkan perlindungan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan negara ini. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala upaya yang kita lakukan. Aamiin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO

